

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan dasar perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak satu atau lebih orang (prinsipal) dengan manajer (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dimana agen diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk membuat keputusan. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan atas tugas yang telah dibebankan kepada agen. Sedangkan agen bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki kekuasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prinsipal. (Jansen dan Mecling, 1976 dalam Perwitasari, 2017). Dapat dikatakan bahwa prinsipal sebagai pemilik perusahaan (pemegang saham) sedangkan agen sebagai manajer dalam manajemen suatu perusahaan.

Salah satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi yang berbeda (Ardanty dan Sofie, 2016). Adanya pemisahan antara prinsipal dan agen merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan dan pada akhirnya mengarah pada asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena pihak agen lebih mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan dengan prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Timbul dan berkembangnya asimetri informasi antara manajer (manajemen/agen) dengan pemilik perusahaan (prinsipal) dapat membuka peluang yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri daripada bertanggung jawab kepada pemegang saham (Salipadang, *et al.*, 2017).

Untuk mendapatkan reputasi yang baik bagi para pemangku kepentingan, maka manajemen berusaha untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tepat waktu. Pemilik perusahaan menginginkan agar laporan keuangan perusahaan segera dipublikasikan setelah periode tutup buku berakhir, karena hal tersebut dapat menjadikan *good news* yang dibawa oleh perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan perusahaan sehingga dimungkinkan terjadinya peningkatan harga ataupun volume saham.

2.1.2. Corporate Governance

2.1.2.1. Pengertian Corporate Governance

Kata *governance* diambil dari kata latin yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Kemudian dalam ilmu manajemen bisnis kata *governance* diadaptasi menjadi *corporate governance* yang artinya sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk di dalamnya suatu perusahaan (Sutojo dan John Aldridge, 2005).

Pengertian *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Corporate governance adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. *Corporate governance* memiliki struktur yang mengatur mengenai penetapan tujuan, sarana-sarana dalam mencapai tujuan, serta

pemantauan kinerja (Gramling dan Hermanson dalam Ardanty dan Sofie, 2016).

Corporate governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham (Triwahyuningtias, 2012).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dan peraturan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban para *stakeholders* guna menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (*value added*).

2.1.2.2. Unsur *Corporate Governance*

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2005), terdapat empat unsur penting dalam *corporate governance*, yaitu:

1. Keadilan (*Fairness*)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparansi (Transparency)*

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. *Akuntabilitas (Accountability)*

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *Two Tiers System*).

4. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG (*Good Corporate Governance*) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan (KNKG, 2006). Asas GCG yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*

Prinsip dasar dalam transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar dalam akuntabilitas bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karenanya, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar dalam responsibilitas bahwa perusahaan harus memantuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar dalam independensi adalah untuk melancarkan *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Ketepatan (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu unsur dari *corporate governance* yang mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, dan dapat dibandingkan menyangkut posisi keuangan perusahaan dan pengelolaan perusahaan.

2.1.2.3. Prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *corporate governance* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2005) menyangkut hal-hal

sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham.

Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:

- a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
 - b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
 - c. Memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur
 - d. Dapat ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - f. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan atau dividen
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham

Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self dealing* serta mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders*, dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

4. Transparansi dan penjelasan

Kerangka *corporate governance* harus dapat memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi tentang keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Selain itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal untuk melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan perusahaan.

5. Peranan dewan komisaris

Kerangka *corporate governance* harus dapat menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Terdapat 2 prinsip utama *corporate governance* menurut Sudarmadi dalam Hanas (2009) yaitu pertama, kejelasan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, itikad perusahaan untuk melakukan pengungkapan

(*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*.

2.1.2.4. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) penerapan *corporate governance* dalam perusahaan akan membawa

beberapa manfaat antara lain:

1. Mudah untuk meningkatkan modal
2. Rendahnya biaya modal
3. Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi
4. Memberi pengaruh positif pada harga saham

Menurut Hanas (2009), dengan dilaksanakannya *corporate governance*, manfaat yang akan diperoleh diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat
2. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh direksi (*agency cost*) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
3. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan nilai (*value*) saham perusahaan

4. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen
5. Praktik *good corporate governance* menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholder* yang harus dikelola dengan baik sehingga akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan
6. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan biaya akibat tuntutan *stakeholders* kepada perusahaan

Dilaksanakannya *corporate governance* pada suatu perusahaan dengan tepat akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat salah satunya dengan diselesaikannya laporan keuangan dengan tepat waktu. Laporan keuangan yang tepat waktu akan memberikan informasi yang akurat sehingga pengambilan keputusan akan lebih baik.

2.1.2.5. Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* merupakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan (*control*) terhadap keputusan tersebut (Rahiim, 2013).

Effendi (2016) memaparkan bahwasanya mekanisme *corporate governance* terdiri dari beberapa fungsi yang dimaksudkan agar tujuan

corporate governance dapat tercapai. Lima fungsi pokok *corporate governance* yaitu:

1. *Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab)

Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas mengenai hal tersebut.

2. *Enforcement* (penegakan)

Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar *corporate governance*.

3. *Advisory* (pemberi saran)

Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dilakukan berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen.

4. *Assurance* (penjaminan)

Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan *corporate governance* dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan.

Menurut Sutedi (2016) terdapat 2 mekanisme *corporate governance* yakni mekanisme internal dan mekanisme eksternal.

a. Mekanisme Internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme internal berada di dalam perusahaan, dan berasal dari dua pihak yakni dewan komisaris sebagai titik tertinggi yang melakukan sistem pengendalian internal dan manajemen yang bertindak sebagai agen perusahaan (Gillan, 2006).

b. Mekanisme Eksternal

Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Mekanisme eksternal bisa berasal dari pasar modal, pasar kontrol perusahaan, pasar tenaga kerja, status negara, keputusan pengadilan, pemegang saham dan praktik dari aktifitas investor (Dharmastuti, 2013).

Mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Untuk menerapkan *corporate governance* maka diperlukan suatu cara atau metode yang disebut dengan mekanisme *corporate governance*. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam menerapkan mekanisme *corporate governance* secara efektif dan maksimal dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, salah satunya adalah laporan keuangan dilaporkan tepat waktu (*timeliness*).

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* adalah sebagai berikut:

2.1.2.6. Kepemilikan Manajerial

Menurut Egon Zehnder dalam FCGI, dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Wahidahwati (2002) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris. Kepemilikan Manajerial yaitu prosentase saham yang dimiliki

oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi) (Ardanty dan Sofie, 2016).

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Menurut Jensen dan Meckling dalam Agusta (2017), kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan *profit* yang maksimal. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan yang baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik mengungkapkan laporan keuangannya lebih segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan manajerial salah satu faktor yang menunjang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2.1.2.7. Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., dalam Pujiati (2015):

“Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan” Kepemilikan

institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk juga saham milik pemerintah (Agusta, 2017). Kepemilikan Institusional memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham yang mereka investasikan di perusahaan tersebut, sehingga dapat menuntun penyelesaian laporan audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan tersebut (Ardanty dan Sofie, 2016).

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat sehingga dapat mengawasi manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya (Anggiani dalam Agusta, 2017).

Kepemilikan Institusional yaitu prosentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor}}{\text{Jumlah total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.2.8. Komisararis Independen

Pengertian komisararis independen menurut Tidano (2007) adalah komisararis yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan (independen) dari para *stakeholders* perusahaan. Komisararis yang berasal dari luar perusahaan cenderung akan bertindak lebih

independen, sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (Kep BAPEPAM No KEP643/BL/2012).

Komisaris independen yaitu prosentase anggota komisaris perusahaan yang berasal dari pihak luar (bukan manajemen dan pemilik) (Ardanty dan Sofie, 2016). Komisaris Independen dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris yang berasal dari luar}}{\text{Jumlah keseluruhan anggota komisaris}} \times 100\%$$

Komisaris independen harus bisa berkomitmen penuh dan dapat menolak intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Komisaris independen merupakan bagian yang sangat penting dalam penegakan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih serta integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan di

suatu perusahaan. Dengan adanya komisaris independen yang menjalankan fungsinya di perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan pelaporan keuangannya secara tepat waktu, karena komisaris independen berfungsi sebagai badan pengawasan dan juga melindungi hak-hak para *stakeholders* di luar manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan itu sendiri (Agusta, 2017).

2.1.2.9. Komite Audit

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012, mendefinisikan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang komite audit harus bertindak secara independen. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Keberadaan komite audit merupakan suatu keharusan dalam perusahaan *go public*. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas audit (Ardanty dan Sofie, 2016).

Di dalam melaksanakan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal tersebut akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Hardiningsih dalam Agusta, 2017).

2.1.3. Profitabilitas

2.1.3.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015) pengertian profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi berarti menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik atau dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *good news* (berita baik) sehingga perusahaan akan menyerahkan laporan keuangannya ke publik dengan tepat waktu. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah cenderung akan menunda pelaporan keuangannya ke publik karena perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang buruk dimana laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *bad news*. (Purbasari dan Rahardja, 2014).

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan keefektifan yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam melakukan operasional perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja perusahaan dalam mengelola aset dan menghasilkan laba akan semakin meningkat. Perusahaan yang tingkat pengembalian aktivitya mengalami masalah atau dapat dikatakan mengalami kerugian, maka pihak manajemen perusahaan meminta menjadwalkan ulang waktu pengauditan menjadi lebih

lama dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya (Putra dan Ramantha, 2015). Jika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan pelaporan keuangan menjadi tidak tepat waktu karena harus menyusun ulang jadwal untuk pengauditan laporan keuangan. Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu tanda keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan *profit* (keuntungan).

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan serta manfaat analisis rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

2.1.3.3. Metode Pengukuran Profitabilitas

Mamduh M. Hanafi (2014: 81) mengemukakan 3 (tiga) rasio profitabilitas yaitu:

1. *Profit Margin*

Profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return On Asset (ROA)*

Rasio *Return On Asset (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut ROI (*Return On Investment*). Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Aset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur *return* pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat *leverage* keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Sedangkan Menurut Fahmi (2012) secara umum terdapat 4 (empat) rasio profitabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor. Adapun rumus untuk menghitung rasio *gross profit margin* adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Adapun rumus untuk menghitung rasio *net profit margin* adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Investment (ROI)*

Rasio *return on investment (ROI)* atau pengembalian investasi, di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *return on total asset (ROA)*. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Return On Investment (ROI)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

4. *Return On Equity (ROE)*

Rasio *return on equity (ROE)* disebut juga dengan laba atau *equity*. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus untuk menghitung *return on equity (ROE)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders Equity}}$$

2.1.4. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Karakteristik penting dari pelaporan keuangan yaitu ketepatan penyampaian waktu pelaporan keuangan (*timeliness*) (Rivandi dan Gea, 2018). Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan merupakan salah satu nilai relevansi dalam kualitas laporan keuangan, apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Karakteristik yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan dengan tepat waktu, dengan demikian ketepatan waktu pelaporan informasi keuangan merupakan unsur penting bagi pemakai informasi (Salipadang, *et al.*, 2017). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan cerminan dari diterapkannya *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Ketepatan waktu juga merupakan salah satu syarat agar informasi dikatakan relevan. Dikatakan relevan jika informasi tersebut tersedia tepat waktu bagi para pengambil keputusan sebelum para pengambil keputusan tersebut kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dengan demikian informasi dapat dikatakan relevan apabila

informasi tersebut memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik dan tersedia tepat pada waktunya (Aprianti, 2017).

Salah satu kendala informasi yang relevan dan andal menurut PSAK (IAI, 2015) adalah tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan tersebut kemudian diperbarui pada tahun 2012 melalui Peraturan Bapepam nomor: KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4

(empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Bapepam yang sekarang menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2013) dalam peraturannya tentang

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke empat setelah tahun buku berakhir. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan.

2.1.5. Laporan Keuangan

2.1.5.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015: 2)

adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana),

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Hery (2015), laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses akuntansi yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan dalam periode tertentu.

2.1.5.2. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut PSAK No. 1 tahun 2015 adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai informasi

laporan keuangan. Maksudnya adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain.

3. Keandalan

Kebermanfaatan informasi suatu laporan keuangan adalah informasi yang disajikan harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat

atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda

2.1.5.3. Jenis Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses akuntansi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dalam suatu instansi terdiri dari laporan utama dan laporan pendukung yang berguna untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang lengkap menurut IAI dalam PSAK No.

1 tahun 2015 adalah:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan pada akhir periode terdiri dari beberapa komponen, yaitu: aktiva, kewajiban dan ekuitas.

Menurut IAI (2015), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Sedangkan kewajiban dan ekuitas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) adalah

“Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan akan mengandung manfaat, sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.”

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode

Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba komprehensif merupakan perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, termasuk di dalamnya seperti; selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi *available for sales*, serta dampak translasi laporan keuangan.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan yang menunjukkan total laba/rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali.

4. Laporan arus kas selama periode

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, seperti; dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan (pengelolaan modal).

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

Menurut Hery (2015), urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian.

2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owners's Equity*)

Adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.

Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal.

3. Neraca (*Balance Sheet*)

Adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)

Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes To The Financial Statements*)

Merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.5.4. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam PSAK No. 1 tahun 2015 tujuan laporan keuangan adalah:

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan”

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2015), adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Menurut Fahmi (2012), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.

2.1.5.5. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 yang menjadi pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Investor

Investor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi di perusahaan tersebut.

2. Karyawan

Informasi yang didapat dari laporan keuangan berguna untuk menilai stabilitas dan profitabilitas perusahaan.

3. Pemberi pinjaman

Informasi keuangan dapat memungkinkan bagi pemberi pinjaman untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada saat sebelum atau saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan usaha kreditur lainnya

Informasi dari laporan keuangan perusahaan memungkinkan pemasok untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang dapat

dilunasi/dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan.

6. Pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya

Membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Informasi laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.6. Telaah Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini disusun berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih (2015) dengan judul pengaruh *corporate governance*, kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan terhadap

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan umur perusahaan sebagai variabel kontrol. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesian *Capital Market Directory* (ICMD) dan *Indonesian Stock Exchange* (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah data yang diambil pada tahun 2007 sebanyak 162 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun data yang dapat digunakan untuk penelitian hanya 100 perusahaan dengan menggunakan regresi logistik.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit, kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa komisaris independen, kinerja keuangan (ROI), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Umur perusahaan yang ditetapkan sebagai variabel kontrol dimana data diambil pada BEI dengan kriteria pengukuran sejak perusahaan terdaftar di BEI sampai tahun 2006 juga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan untuk komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar dan semakin lama perusahaan berdiri, semakin taat dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diteliti oleh Ardanty dan Sofie (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan 276 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2014. Metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi logistik (*binary logistic regression*). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian lain yaitu oleh Amelia (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan ukuran dewan direksi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan rasio *leverage* sebagai variabel kontrol. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2010

secara berturut-turut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 136 sampel yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk kepemilikan institusional dan kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan ukuran dewan direksi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aprianti (2017), penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perkembangan pertumbuhan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *debt to equity ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi, sedangkan penelitian verifikatif digunakan untuk meneliti ulang hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memverifikatif kebenaran hasil penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data menggunakan teknik statistik parametrik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 perusahaan di sektor industri *food and beverages* dan sektor industri *textile* pada periode penelitian tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, kemudian didapat 15 perusahaan sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan rentang waktu pelaporan keuangan diketahui bahwa rata-rata 92 hari, artinya rata-rata seluruh perusahaan melaporkan lebih lama 2 hari dari ketentuan batas waktu pengumuman oleh Bapepam, yaitu 90 hari terhitung dari tanggal tutup buku per 31 Desember. Besarnya pengaruh antara ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *debt to equity ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah pada uji koefisien parsial antara ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu memberi hasil bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan. Sedangkan uji koefisien parsial antara profitabilitas dan *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan. Apabila ditarik kesimpulan secara simultan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan secara bersama-sama secara signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Salipadang, *et al.* (2017) bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dari mekanisme *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan dampaknya terhadap *return* saham.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 dan 2016. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik dan regresi berganda.

Dari uji hipotesis yang dilakukan mendapatkan hasil yakni kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return* saham. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rivandi dan Gea (2018) yang meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (studi empiris pada perusahaan perbankan milik pemerintah pusat). Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan perbankan milik pemerintah pusat; mempunyai laporan keuangan yang sudah *go public* dari tahun 2009-2016; memiliki variabel kepemilikan manajerial, komite audit

dan komisaris independen. Berdasarkan kriteria dalam penelitian di atas, maka sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 4 perusahaan dengan jumlah data pengamatan selama 8 tahun adalah 32 data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel II.1 berikut ini merupakan ringkasan dari pemaparan telaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
1	Setyaningsih (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel yang digunakan: Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI.	Variabel yang digunakan: Variabel kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol: umur perusahaan. Sampel penelitian pada perusahaan manufaktur, data diambil dari tahun 2007. Model analisis data: Model regresi logistik (<i>binary logistic regression</i>).	Komisaris independen, kinerja keuangan (ROI), ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan untuk komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
2	Rivandi dan Gea (2018)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan	Variabel yang digunakan (Independen): kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen. Variabel (Dependen) yaitu ketepatan waktu. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI. Model analisis data: Model regresi berganda.	Sampel penelitian pada perusahaan perbankan milik pemerintah pusat. Periode observasi data dari tahun 2009-2016.	Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
3	Aprianti (2017)	Pengaruh ukuran perusahaan, <i>profitability</i> , dan <i>debt equity ratio</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan	Variabel yang digunakan: profitabilitas. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI. Model analisis data: Model regresi berganda. Metode penelitian: deskriptif dan verifikatif.	Variabel yang digunakan: ukuran perusahaan, <i>debt to equity ratio</i> . Sampel penelitian pada sektor industri <i>food and beverages</i> dan sektor industri <i>textile</i> pada periode penelitian tahun 2006-2008.	Pada uji koefisien parsial antara ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu memberi hasil bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan. Sedangkan uji koefisien parsial antara profitabilitas dan <i>debt to equity ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan. Apabila ditarik kesimpulan secara simultan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>debt to equity ratio</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan secara bersama-sama secara signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
4	Ardanty dan Sofie (2016)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia	Variabel yang digunakan: Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari website BEI.	Variabel yang digunakan: Kualitas audit. Sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Model analisis data: Model regresi logistik (<i>binary logistic regresion</i>).	Kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
5	Amelia (2017)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan	Variabel yang digunakan: Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI.	Variabel yang digunakan: Kualitas audit, ukuran dewan direksi. Variabel kontrol: ukuran perusahaan, profitabilitas, rasio <i>leverage</i> . Sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2010. Model analisis data: Model regresi logistik (<i>binary logistic regression</i>).	Kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk kepemilikan institusional dan kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan ukuran dewan direksi.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
6	Salipadang, <i>et al.</i> (2017)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan dampaknya terhadap <i>return</i> saham	Variabel yang digunakan: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI. Model analisis data: Model regresi berganda.	Dampak terhadap <i>return</i> saham. Sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 dan 2016. Model analisis data: Model regresi logistik (<i>binary logistic regression</i>).	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>return</i> saham. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
7	Putra dan Ramantha (2015)	Pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan	Variabel yang digunakan: Profitabilitas kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Model analisis data: model regresi berganda. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI.	Variabel yang digunakan: umur perusahaan. Sampel penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2013.	Profitabilitas, umur perusahaan dan komisaris independen berpengaruh positif pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit tidak berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
8	Indrayenti dan Ie (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Variabel yang digunakan (Independen): Profitabilitas. Variabel (Dependen) yaitu ketepatan waktu. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI.	Variabel yang digunakan: Likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit. Sampel penelitian pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 sampai 2014. Model analisis data: Model regresi uji <i>nagelkerke R Square</i> dan uji <i>hosmer dan lemeshow test</i> .	Rasio profitabilitas yang diindikasikan dengan ROA secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tidak selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia dan tidak selalu perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia. Likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, opini audit secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
9	Riswan dan Saputri (2015)	Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>debt to equity</i> terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Variabel yang digunakan (Independen): Profitabilitas. Variabel (Dependen) yaitu ketepatan waktu. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI. Model analisis data: Uji regresi secara parsial (Uji t).	Variabel yang digunakan: Ukuran perusahaan, <i>debt to equity</i> . Sampel penelitian pada perusahaan jasa asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012.	Profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>debt to equity</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia 2010-2012.

Bersambung ke halaman selanjutnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
10	Andriana dan Raspati (2015)	Pengaruh profitabilitas dan kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Variabel yang digunakan: Profitabilitas. Metode pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> . Data yang digunakan: data sekunder diambil dari <i>website</i> BEI.	Variabel yang digunakan: Kepemilikan publik. Model analisis data: Model regresi logistik (<i>binary logistic regresion</i>). Sampel penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2013.	Hasil uji regresi logistik yang menggunakan metode <i>backward stepwise</i> dan tingkat signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, yang diproksikan dengan indikator <i>Return on Asset</i> berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara variabel kepemilikan publik menunjukkan tidak terdapatnya pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Sumber : Artikel Terkait

2.2.Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Timeliness*

Tujuan dibentuknya komisaris independen ialah untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan demi melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lainnya (Ardanty dan Sofie, 2016). Komisaris independen merupakan bagian yang sangat penting dalam penegakan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih serta integritas yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan di suatu perusahaan. Dengan adanya komisaris independen yang menjalankan fungsinya di perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan pelaporan keuangannya secara tepat waktu, karena komisaris independen berfungsi sebagai badan pengawasan dan juga melindungi hak-hak para *stakeholders* diluar manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan itu sendiri (Agusta, 2017).

Beberapa peneliti telah meneliti tentang pengaruh komisaris independen terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ramantha (2015), Setyaningsih (2015), Amelia (2017), serta Salipadang, *et al.* (2017) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *timeliness*. Hal tersebut disebabkan karena semakin besar komposisi komisaris independen maka jumlah hari yang dibutuhkan untuk publikasi laporan keuangan tahunan akan semakin besar, dengan kata lain waktu publikasi laporan keuangan tahunan akan semakin lama. Hasil tersebut

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardanty dan Sofie (2016), serta Rivandi dan Gea (2018) Komisaris independen tidak mempengaruhi keputusan ketepatan pelaporan keuangan. Banyak atau sedikitnya komposisi komisaris independen yang bekerja membantu dalam memberikan pengawasan dan suksesnya perusahaan tidak berarti besar dalam melakukan ketepatan penyampaian pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₁ : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* (ketepatan waktu) penyampaian laporan keuangan.

2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Timeliness*

Jensen dan Meckling dalam Salipadang, *et al.* (2017) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang artinya semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Telah banyak peneliti yang meneliti tentang hal tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Amelia (2017), Salipadang, *et al.* (2017) serta Rivandi dan Gea (2018) dengan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Kehadiran kepemilikan manajerial ingin menunjukkan adanya usaha dan keinginan untuk menyamakan perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh manajemen dan pemilik perusahaan. Adanya keikutsertaan manajemen dalam pengambilan keputusan

perusahaan mengindikasikan bahwa manajer turut bertanggung jawab dalam meminimalisir terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Namun penelitian tersebut berbeda hasil dengan Setyaningsih (2015), serta Ardanty dan Sofie (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena manajer selaku pemilik perusahaan kurang dapat memberikan tekanan kepada perusahaan untuk dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Manajer selaku pemilik perusahaan pada umumnya hanya mendahulukan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* (ketepatan waktu) penyampaian laporan keuangan.

2.2.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Timeliness* Penyampaian Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga memungkinkan untuk melakukan monitoring terhadap manajemen (Djakman dan Machmud dalam Putra dan Ramantha, 2015).

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat sehingga dapat mengawasi manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak

yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya (Anggiani dalam Agusta, 2017).

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, hal tersebut telah diteliti oleh Putra dan Ramantha (2015), Ardanty dan Sofie (2016), serta Amelia (2017). Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi keputusan ketepatan pelaporan keuangan, dimana apabila tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan akan rendah. Berbeda dengan hasil dari penelitian Salipadang, *et al.* (2017) bahwa keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme pengawasan yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Tindakan pengawasan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistik* dan meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *timeliness*

(ketepatan waktu) penyampaian laporan keuangan.

2.2.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Timeliness* Penyampaian Laporan Keuangan

Rivandi dan Gea (2018) menyatakan bahwa komite audit di dalam perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan memberdayakan internal audit atau sistem pengendalin *intern* perusahaan dalam melakukan ketepatan waktu dalam penyampaian suatu laporan keuangan. Komite audit bertanggungjawab untuk memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan berlaku dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2017), Salipadang, *et al.* (2017), serta Rivandi dan Gea (2018) secara bersama-sama menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besar jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, maka akan semakin meningkat pula usaha komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan membantu kerja dewan komisaris dalam memonitor kinerja dewan direksi agar dapat memberikan pelaporan keuangan tahunan tepat waktu. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ramantha (2015), Setyaningsih (2015), serta Ardanty dan Sofie (2016), hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jika tingkat komite audit yang tinggi maka ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan akan rendah sehingga komite audit tidak mempengaruhi keputusan ketepatan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₄ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* (ketepatan waktu) penyampaian laporan keuangan.

2.2.5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Timeliness* Penyampaian Laporan Keuangan

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi berarti menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik atau dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *good news* (berita baik) sehingga perusahaan akan menyerahkan laporan keuangannya ke publik dengan tepat waktu. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah cenderung akan menunda pelaporan keuangannya ke publik karena perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang buruk dimana laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung *bad news*. (Purbasari dan Rahardja, 2014).

Andriana dan Raspati (2015), Putra dan Ramantha (2015), serta Aprianti (2017) telah lebih dulu melakukan penelitian tentang profitabilitas terhadap *timeliness* dengan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) publikasi laporan keuangan tahunan. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswan dan Saputri (2015) serta Indrayenti dan Ie (2016).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tidak selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia dan tidak selalu perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan

terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka

dirumuskan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₅ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* (ketepatan waktu) penyampaian laporan keuangan.

2.2.6. Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Profitabilitas Terhadap *Timeliness* Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Janrosi dan Chen (2018) komisaris independen suatu perusahaan harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu. Disisi lain, kepemilikan manajerial merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer perlu suatu mekanisme pengawasan internal yaitu kontrak insentif jangka panjang. Dengan demikian manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Kepemilikan saham oleh pihak

institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan laporan keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang disampaikan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh (Janrosi dan Chen, 2018) menunjukkan secara simultan komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan pengujian yang dilakukan oleh Aprianti (2017) setelah dilakukan uji signifikansi pengaruh secara simultan antara variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *debt to equity ratio* diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H₆ : Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan

Institusional, Komite Audit dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap (*timeliness*) ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat dibentuk kerangka pemikiran pada gambar II.1 sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

